

**PERTANGGUNJAWABAN SECARA PIDANA BAGI PENGUSAHA
DALAM PENGHALANGAN PELAKSANAAN FUNGSI SERIKAT
BURUH DI PERUSAHAAN**

(Studi Kasus di PT King Jim Indonesia - Pasuruan)

BUDIJANTO , ROHMAN

Pembimbing : Dr M. Hadi Shubhan SH MH CN

TRADE UNIONS – LAW AND LEGISLATION

KKB KK-2 TH 47/09 Bud p

Copyright : @ 2009 by Airlangga University Library

ABSTRAKSI

Serikat buruh bangkit secara signifikan sejak jatuhnya rezim Soeharto. Jika di era Orde Baru satu-satunya serikat buruh yang diakui adalah Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI), kini buruh bisa membuat atau bergabung dalam serikat secara bebas. Undang Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh memberikan jaminan kepada setiap buruh/pekerja untuk mendapatkan haknya itu. Undang undang itu mengancam dengan hukuman berat (1 tahun sampai 5 tahun penjara) kepada siapapun yang membuat setiap tindakan untuk menghalangi, mencegah, atau mengintimidasi berfungsinya serikat buruh.

Dalam kasus pertama di PT King Jim Indonesia, Pasuruan, pengadilan menghukum *general manager* perusahaan itu, Ir Fathoni Prawata, selama 1,5 tahun penjara di awal tahun 2009. Apakah hanya dia yang harus bertanggung jawab atas kejahatan yang dilakukan atas nama perusahaan? Analisis dalam tesis ini difokuskan pada orang dan pihak lain dalam perusahaan yang bisa dimintai pertanggungjawaban di pengadilan pidana, termasuk korporasinya.

ABSTRACTS

Labor unions emerge significantly since Soeharto regime toppled down. If in the New Order era the only union was All Indonesia Union Workers (SPSI), nowadays labors have a right to create or join an union freely. Law No 21/2000 on Workers/Labors Union gives guarantees to every labor/worker to do the right. The law threatens severe jail punishment (1 to 5 years) and fine (Rp 100 million-Rp 500 million) to someone who making every kinds of actions to prevent or hamper or intimidate against the functions of union.

In the first case of PT King Jim Indonesia, Pasuruan, court sent to jail the general manager of the company Ir Fathoni Prawata to 1,5 years in early 2009. Should the only him be held responsible to this statutory crime? Analysis of this thesis focused on the other persons and parts in the company who could be asked responsibility on the case in criminal court, included the corporate.